



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUK WALUYO RAHARJO
2. Jabatan : INSPEKTUR
3. NHK : 441741

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.135.000.000**

1. Tanah Seluas 204 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 205 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 239 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 5.305 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 2.830 m2 di KAB / KOTA TUBAN, WARISAN Rp. 150.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 635 m2/200 m2 di KAB / KOTA TUBAN, WARISAN , LAINNYA , Rp. 1.500.000.000
8. Tanah Seluas 2.310 m2 di KAB / KOTA TUBAN, WARISAN Rp. 125.000.000
9. Tanah Seluas 6.235 m2 di KAB / KOTA TUBAN, WARISAN , LAINNYA , Rp. 135.000.000
10. Tanah Seluas 3.520 m2 di KAB / KOTA TUBAN, WARISAN , LAINNYA , Rp. 125.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 109.500.000

1. MOBIL, KIA CARENS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOTOR, YAMAHA FAZZIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 60.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 877.124.929

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 4.181.624.929

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.181.624.929

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.